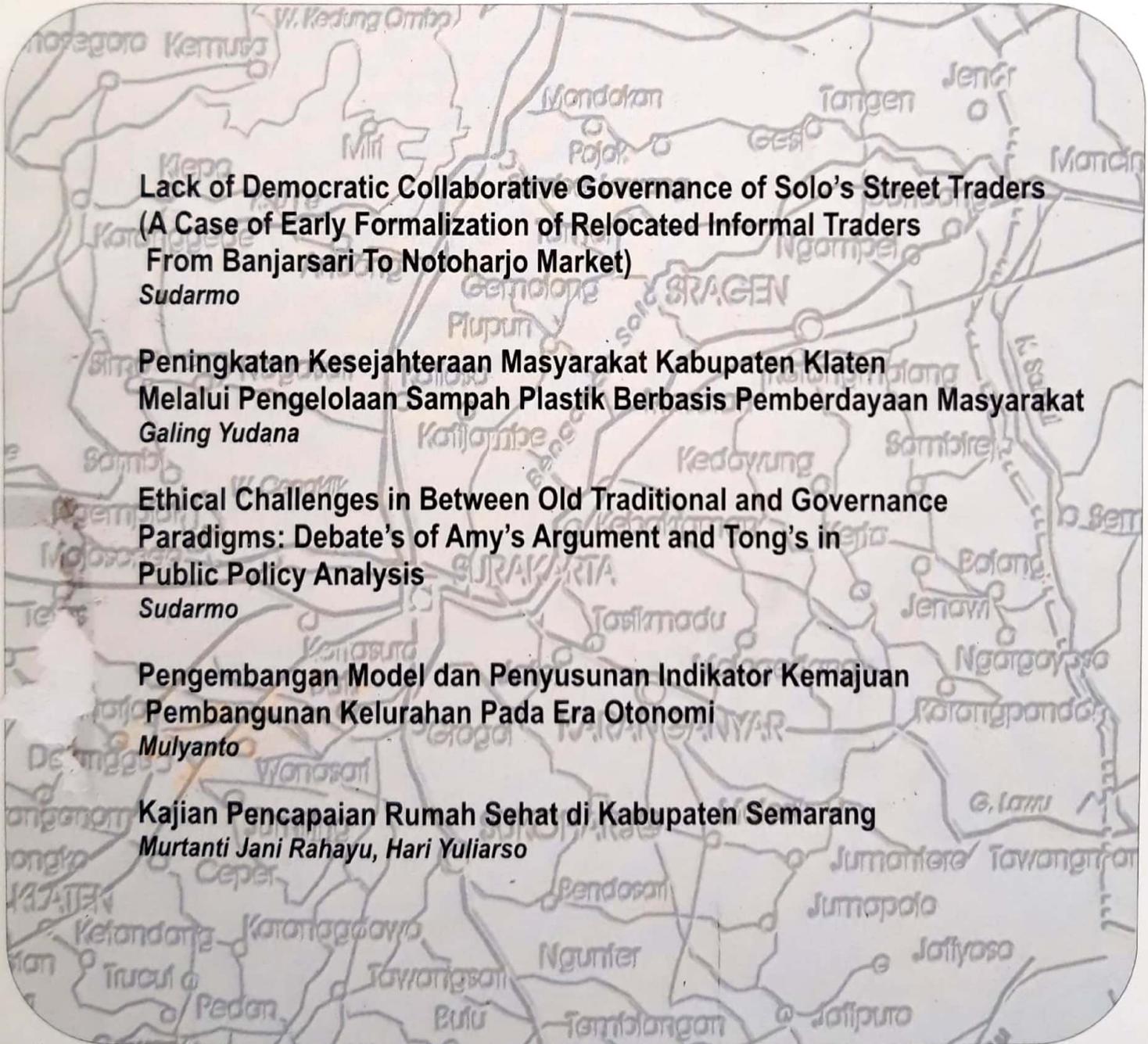


# Region

**Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif**



**Lack of Democratic Collaborative Governance of Solo's Street Traders  
(A Case of Early Formalization of Relocated Informal Traders  
From Banjarsari To Notoharjo Market)**

*Sudarmo*

**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Klaten  
Melalui Pengelolaan Sampah Plastik Berbasis Pemberdayaan Masyarakat**

*Galing Yudana*

**Ethical Challenges in Between Old Traditional and Governance  
Paradigms: Debate's of Amy's Argument and Tong's in  
Public Policy Analysis**

*Sudarmo*

**Pengembangan Model dan Penyusunan Indikator Kemajuan  
Pembangunan Kelurahan Pada Era Otonomi**

*Mulyanto*

**Kajian Pencapaian Rumah Sehat di Kabupaten Semarang**

*Murtanti Jani Rahayu, Hari Yuliarso*

**Penanggungjawab:** Ketua LPPM UNS, Surakarta

**Pemimpin Penyunting:** Fauzan Ali Ikhsan, ST,MT

**Wakil Pemimpin Penyunting:** Lukman Hakim, SE.,M.Si

**Penyunting Ahli:**

Ir. Winny Astuti, M.Sc, Ph.D (UNS)

Ir. Holy Bina Wijaya, MUM (UNDIP)

Pieter Abdullah, SE., MA. (Bank Indonesia)

**Penyunting Pelaksana:**

Heri Sulistyono Jati, SE

**Tata Usaha:**

Ir. Ana Hardiana, MT

**Alamat Sekretariat:**

PUSAT INFORMASI DAN PEMBANGUNAN WILAYAH  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Urip Sumoharjo No. 110 Surakarta telp. 0271 - 635901, faks. 0271 - 635902

email : pipw@uns.ac.id Website : www.lppm.uns.ac.id

---

**Region**, diterbitkan oleh Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) UNS Surakarta mulai tahun 2006; berisi tulisan tentang hasil penelitian, gagasan konseptual, resensi buku, yang kesemuanya berada dalam lingkup perencanaan wilayah dan kota serta perencanaan partisipatif. Jurnal terbit dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli. Redaksi menerima tulisan ilmiah dalam bidang-bidang yang relevan dengan masalah perencanaan wilayah dan kota serta pembangunan daerah, dengan ketentuan sebagaimana dalam Panduan pada sampul belakang dalam. Naskah yang masuk akan dievaluasi oleh Dewan Penyunting. Redaksi berhak melakukan perubahan pada tulisan yang layak muat demi konsistensi gaya, namun tanpa merubah maksud isinya. Hak cipta intelektual dari tulisan tetap melekat pada Penulis.

## DAFTAR ISI

Lack Of Democratic Collaborative Governance Of Solo's Street Traders (A Case Of Early Formalization Of Relocated Informal Traders From Banjarsari To Notoharjo Market) <i>Sudarmo</i>	1 - 16
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Klaten Melalui Pengelolaan Sampah Plastik Berbasis Pemberdayaan Masyarakat <i>Galing Yudana</i>	17 - 30
Ethical Challenges in Between Old Traditional and Governance Paradigms: Debates of Amy's Argument and Tong's in Public Policy Analysis <i>Sudarmo</i>	31 - 41
Pengembangan Model Dan Penyusunan Indikator Kemajuan Pembangunan Kelurahan Pada Era Otonomi <i>Mulyanto</i>	43 - 58
Kajian Pencapaian Rumah Sehat Di Kabupaten Semarang <i>Murtanti Jani rahayu, Hari Yuliarso</i>	59 - 68

# PENGEMBANGAN MODEL DAN PENYUSUNAN INDIKATOR KEMAJUAN PEMBANGUNAN KELURAHAN PADA ERA OTONOMI

MULYANTO

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN, FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA  
EMAIL: YANTO.MUL@GMAIL.COM

*Abstract : The purpose of this research was to construct the model and indicators to measure the development progress of the village area in autonomy era. The data used in this study were adopted from the time series secondary data of some indicators that classified into four indicators, namely: (i) GCI (Government Capacity Indicators/ Index); (ii) DDI (District Development Indicators/Index); (iii) CEI (Community Empowerment Indicators/Index); and (iv) CSI (Community Self-Supporting Indicators / Index). These indicators would be composed into index, namely VDI (Villages Development Index).*

*Using the secondary data for three years (2004, 2005 and 2006), collected from 51 villages in Surakarta City; the results of this study as follows: (i) GCI has provided a great contribution to VDI compared with the DDI, CEI and CSI; (ii) Composing the mean from the VDI index into the district index; the District of Laweyan was the biggest index compared with the others, then it was followed by the District of Banjarsari, the District of Jebres, the District of Serengan, and finally the District of Pasar Kliwon; (iii) The Villages such as the Village of Jajar [the District of Laweyan]; the Village of Kerten [the District of Laweyan]; the village of Sumber [the District of Banjarsari]; the Village of Mojosongo [the District of Jebres]; and the Village of Gandekan [the District of Jebres] have a great index compared with the other. On the contrary, the villages such as the Village of Semanggi [the District of Pasar Kliwon]; the Village of Pasar Kliwon [the District of Pasar Kliwon]; the Village of Kepatihan Wetan [the District of Jebres]; the Village of Panularan [the District of Laweyan]; and the Village of Kepatihan Kulon [the District of Jebres] have a inferior index.*

**Key words:** Indeks Pembangunan Kelurahan, Indikator Kemajuan Pembangunan Kelurahan, Otonomi Daerah.

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang ditandai dengan semangat desentralisasi kewenangan (*power sharing*) dan desentralisasi keuangan (*fiscal decentralization*) mulai dilaksanakn secara penuh sejak awal tahun 2001, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2001. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; yang sekarang ini, kedua UU tersebut telah dirubah menjadi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Di lain pihak, pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya diarahkan dan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan (*service*

*delivery*) Pemerintah Daerah (*local government*) kepada masyarakat (*social community*) agar lebih efisien dan responsif terhadap potensi, kebutuhan maupun karakteristik di masing-masing daerah. Cara yang ditempuh yaitu dengan meningkatkan hak dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri, tetapi masih berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, kewenangan Pemerintah Pusat menjadi semakin berkurang dan akan lebih berperan sebagai *fasilitator* sekaligus *evaluator* kepada seluruh Pemerintah Daerah (baik Propinsi, Kabupaten dan Kota) atas pelaksanaan otonomi daerah yang sudah dan sedang berjalan. Peran sebagai *fasilitator* dan *evaluator*, khususnya sangat terasa dalam beberapa aspek, seperti: (i) Penghapusan, Penggabungan dan Pemekaran Wilayah; (ii) Kebijakan tentang Perencanaan Nasional dan Pengendalian Pembangunan Nasional secara makro; (iii) Penetapan Dana Perimbangan Keuangan dan sebagainya (Bappenas 2001).

Dalam konteks Pemerintah Daerah, sangat mendesak untuk dilakukan suatu penelitian/pengkajian yang dapat menghasilkan suatu indikator atau tepatnya indeks yang menunjukkan bobot/besaran nilai mengenai suatu hal; sebagaimana Pemerintatah Pusat telah melakukannya ketika membagi dan mengalokasikan besaran DAU (Dana Alokasi Umum) kepada Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Di lain pihak, pembangunan daerah sendiri sering diartikan sebagai suatu proses yang berdimensi banyak yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan kelembagaan daerah, semisal

percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan faktor penentu lainnya. Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara memperluas kesempatan kerja, pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan hubungan antar daerah/wilayah serta terus diupayakan adanya proses pergeseran kegiatan ekonomi dari Sektor Primer (Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan/ Penggalian); menuju ke Sektor Industri (Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Bangunan); ke Sektor Utilitas (Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih/Minum; dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi); serta ke Sektor Jasa (Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Sektor Sewa Rumah, Sektor Pemerintahan dan Pertahanan, serta Sektor Jasa Lainnya).

Secara umum, tujuan dari pembangunan di suatu daerah adalah: (i) mendorong terciptanya pekerjaan yang berkualitas bagi penduduk dengan mengupayakan peningkatan sumberdaya yang lebih berkualitas, sehingga mampu berperan dalam aktivitas yang lebih produktif; dan (ii) menciptakan stabilitas ekonomi dengan cara menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan bagi pengembangan aktivitas ekonomi daerah. Secara rinci tujuan umum dari adanya pembangunan daerah dalam era otonomi sekarang ini, antara lain meliputi:

1. Mendorong terciptanya pekerjaan yang berkualitas bagi penduduk, yaitu dengan mengupayakan peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) yang lebih berkualitas, sehingga mampu berperan dalam aktivitas yang lebih produktif dibanding dengan yang sudah dilakukan;
2. Berusaha menciptakan stabilitas ekonomi dengan cara

menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi pengembangan aktivitas ekonomi daerah yang meliputi: penyediaan lahan, tenaga kerja, dana pembiayaan dan bantuan teknis/manajemen untuk mencegah timbulnya ketimpangan-ketimpangan yang dapat menghambat pembangunan;

3. Mengusahakan terus terciptanya basis diversifikasi aktivitas ekonomi yang luas, yang diharapkan dapat memperkecil resiko fluktuasi bisnis, dimana dengan adanya basis ekonomi yang kuat maka resiko fluktuasi ekonomi regional/wilayah dapat diperkecil;
4. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi dari berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti: sandang, pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan;
5. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi pertambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, tetapi juga menumbuhkan jati diri pribadi dan daerah yang bersangkutan; serta
6. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta daerah secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari sikap ketergantungan, yang bukan saja pada orang atau daerah lain, melainkan juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Dari berbagai pengertian di atas, maka secara umum dapat diartikan bahwa pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam rangka menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah juga dikatakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Untuk menghasilkan suatu perencanaan yang lebih baik diperlukan dukungan sistem informasi yang relevan, serta dibutuhkan pengetahuan tentang indikator-indikator pembangunan dari hasil pembangunan itu sendiri. Penyusunan indikator-indikator pembangunan dapat dilakukan dari berbagai pendekatan dan kepentingan, yang antara lain berupa pendekatan menurut bidang pembangunan, menurut sektor-sektor pembangunan dan juga menurut kepentingan yang lain. Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) pada beberapa waktu yang lalu menggunakan indikator pembangunan yang dikategorikan ke dalam indikator bidang ekonomi, indikator sosial, dan indikator fisik prasarana.

Di lain pihak, perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sebagai suatu kerangka yang rasional harus mempunyai tolok ukur untuk mengantisipasi dan

memberikan arah bagi proses kebijakan pembangunan. Dalam dokumen Propenas (Program Pembangunan Nasional) Tahun 2000-2004; disebutkan bahwa pembangunan merupakan proses yang melibatkan keterkaitan antara faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Meskipun dalam jangka pendek sulit dikatakan mana yang lebih dominan (apakah faktor ekonomi atau faktor non-ekonomi); namun banyak yang berpendapat bahwa faktor non-ekonomi di dalam jangka panjang, khususnya yang terjadi di Negara Sedang Berkembang termasuk Indonesia; relatif akan berpengaruh terhadap proses pembangunan.

Saat ini dikembangkan indikator-indikator lain yang cukup luas, yang tidak sekedar indikator PDB/PDRB, namun sudah mencakup dimensi dan aspek lain selain faktor ekonomi. Indikator-indikator tersebut secara umum terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: (i) Indikator yang mencakup hasil interaksi dari berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu pola normal atau pola optimal; dan (ii) Indikator yang menangkap kualitas hidup. Secara ringkas indikator pembangunan daerah, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: (i) indikator ekonomi; (ii) indikator non ekonomi; serta (iii) indikator gabungan. Indikator pembangunan semacam PQLI (*Physical Quality of Life Index*); HDI (*Human Development Index*); dan juga RDI (*Regional Development Index*) termasuk dalam kategori indikator gabungan.

Dengan menggunakan data-data sekunder di 51 kelurahan di Kota Surakarta selama tahun 2004-2006; tujuan dari pengkajian ini adalah untuk menyusun dan menghasilkan suatu dokumen yang memuat indeks-indeks kemajuan suatu kelurahan, yang mengukur

aspek-aspek yang relevan dengan pelaksanaan Otonomi dan Pembangunan Daerah. Adapun tujuan secara rinci, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghasilkan suatu indeks umum yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Kelurahan (IPKel) di 51 kelurahan di Kota Surakarta yang dihasilkan dari proses dekomposisi / pembobotan dari 4 (empat) sub indikator, yaitu: (a) Sub Indikator Kapasitas Pemerintahan (KpP); (b) Sub Indikator Perkembangan Wilayah (PkW); (c) Sub Indikator Keberdayaan Masyarakat (KbM); dan Sub Indikator Keswadayaan Masyarakat (KsM).
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Sub Indikator Kapasitas Pemerintahan (KpP) di 51 kelurahan di Kota Surakarta, yang mencakup: (a) Aspek Kapabilitas Aparat; (b) Aspek Keuangan Daerah; serta (c) Aspek Sarana dan Prasarana Pemerintahan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis Sub Indikator Perkembangan Wilayah (PkW) di 51 kelurahan di Kota Surakarta, yang mencakup: (a) Aspek Fasilitas Publik; (b) Aspek Ekonomi Wilayah; serta (c) Aspek Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
4. Untuk mengkaji dan menganalisis Sub Indikator Keberdayaan Masyarakat (KbM) di 51 kelurahan di Kota Surakarta, yang mencakup: (a) Aspek Kependudukan dan Ketenagakerjaan; (b) Aspek Kesejahteraan; serta (c) Aspek Sosial Politik dan Budaya.
5. Untuk mengkaji dan menganalisis Sub Indikator Keswadayaan Masyarakat (KsM) di 51 kelurahan di Kota Surakarta, yang mencakup: (a) Aspek Partisipasi Masyarakat; (b) Aspek Swadaya Murni; serta (c) Aspek Daya Tarik.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengkajian dan analisis

serta penyusunan Indeks Pembangunan Kelurahan (IPKel) yang diterapkan di 51 kelurahan di Kota Surakarta, adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat perbandingan mengenai tingkat kemajuan pembangunan antar kecamatan di Kota Surakarta pada umumnya, dan di 51 kelurahan pada khususnya.
2. Sebagai alat advokasi dan juga alat evaluasi mengenai tingkat perkembangan pembangunan di 5 kecamatan di Kota Surakarta pada umumnya, dan pembangunan di 51 kelurahan pada khususnya.
3. Dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kerangka kerja di dalam perencanaan pembangunan, sebagai alat evaluasi mengenai pemekaran/penggabungan/penghapusan suatu kelurahan, alat penentuan prioritas dan perhitungan alokasi pembiayaan pembangunan; dan sebagainya.

#### METODE PENELITIAN

Beberapa tahap yang dilaksanakan terkait dengan kegiatan pengkajian dan analisis serta penyusunan Indeks Pembangunan Kelurahan (IPKel) di 51 kelurahan di Kota Surakarta, antara lain meliputi:

#### Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data-data sekunder dari berbagai dokumen di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta, seperti Surakarta Dalam Angka; Perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto); Kota Surakarta dan sumber-sumber lain yang terkait dan relevan.

- b. Survey Lapangan, yaitu melakukan observasi langsung kepada pejabat di 51 kelurahan di Kota Surakarta, terkait dengan pencarian data-data pembentuk Indeks Pembangunan Kelurahan (IPKel).
- c. Wawancara, Diskusi dan Konsultasi Nara Sumber, yaitu dengan melakukan pengkajian bersama dengan menghadirkan nara sumber dari unit kerja atau instansi di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta, terutama masukan dari tenaga ahli terkait untuk mendapatkan data-data dan informasi yang mendukung dicapainya berbagai variabel pembentuk Indeks Pembangunan Kelurahan (IPKel).

#### Cakupan Studi

Cakupan dalam pengkajian dan analisis serta penyusunan Indeks Pembangunan Kelurahan (IPKel) di Kota Surakarta, di bagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu :

- a. Inventarisasi Data-data Pendukung Indikator, yaitu melakukan pengumpulan data yang terkait dengan pembuatan berbagai indikator dan sub indikator yang dikelompokkan ke dalam: (i) Sub Indikator Indikator Kapasitas Pemerintah; (ii) Sub Indikator Indikator Perkembangan Wilayah; (iii) Sub Indikator Indikator Keberdayaan Masyarakat; dan (iv) Sub Indikator Indikator Keswadayaan Masyarakat.
- b. Penetapan Sub-Sub Indikator, yaitu mencari sub-sub indikator yang menyertai keempat sub indikator utama, yang kemudian disertai dengan pembobotan nilai-nilai numerik intensitasnya.

- c. Penghitungan rating/peringkat, yaitu melakukan serangkaian perhitungan sampai didapatkan Indeks Pembangunan Kelurahan (IPKel) di 51 kelurahan di Kota Surakarta dan sekaligus melakukan pemeringkatan atas nilai-nilai indeks yang telah dihasilkan, serta menguji ada tidaknya selama kurun waktu 2004-2006.

#### Model Studi/Pengkajian

Model studi yang digunakan di dalam penyusunan dan perumusan Indeks Pembangunan Kelurahan (IPKel) di 51 kelurahan di Kota Surakarta adalah kajian data statistik dengan model skoring, adapun tahapan penyusunannya dapat digambarkan melalui skema, seperti yang dapat dilihat pada gambar 2.1.

Bobot dibuat untuk membandingkan kriteria yang satu dengan yang lain, menurut urutan mana yang lebih penting. Bobot juga dibuat untuk membandingkan sub kriteria yang satu dengan yang lain pada masing-masing kriteria berdasarkan urutan mana yang lebih penting. Bobot tersebut berupa nilai dan jumlahnya sama dengan 1 (satu) untuk setiap level atau tingkat pada hierarki. Setelah bobot diperoleh, maka bobot ini akan digunakan untuk menentukan Indeks Pembangunan Kelurahan (IPKel) yang mengukur tingkat kemajuan pembangunan kelurahan di suatu kecamatan di Kota Surakarta. Gambaran mengenai klasifikasi bobot kriteria dan sub kriteria hasil perhitungan dengan metode AHP yang telah dilakukan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.2.

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 1. IPKel (Indeks Pembangunan Kelurahan) Tingkat Kota Surakarta

Hasil pengkajian Indeks Pembangunan Kelurahan (IPKel) di tingkat Kota Surakarta, yang dihitung dari rerata masing-masing indeks dan sub indeks pembentuk IPKel, telah ditemukan IPKel Kota Surakarta secara rata-rata selama tahun 2004-2006 adalah sebesar 1,2313; dengan sub indeks pembentuk IPKel, adalah: (i) Besarnya Sub Indeks Kapasitas Pemerintahan (KpP) adalah sebesar 2,0718; (ii) Besarnya Sub Indeks Perkembangan Wilayah (PkW) adalah sebesar 1,0335; (iii) Besarnya Sub Indeks Keberdayaan Masyarakat (KbM) adalah sebesar 0,9785; dan (iv) Besarnya Sub Indeks Keswadayaan Masyarakat (KsM) adalah sebesar 0,8211.

##### 2. IPKel (Indeks Pembangunan Kelurahan) Tingkat Kecamatan

Dengan membuat rerata dari masing-masing Indeks Pembangunan Kelurahan (IPKel) dan juga sub indeks pembentuk IPKel, dapat dapat dijelaskan bahwa peringkat untuk IPKel dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah Kec. Laweyan, Kec. Banjarsari, Kec. Jebres, Kec. Serengan, dan Kec. Pasar Kliwon. Sedang untuk sub indeks pembentuk IPKel, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Peringkat untuk Sub Indeks Kapasitas Pemerintahan (KpP) dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah Kec. Laweyan, Kec. Banjarsari, Kec. Pasar Kliwon, Kec. Serengan, dan Kec. Jebres.
- b. Peringkat untuk Sub Indeks Perkembangan Wilayah (PkW) dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah Kec. Jebres, Kec. Laweyan, Kec. Banjarsari, Kec. Serengan, dan Kec. Pasar Kliwon;

c. Peringkat untuk Sub Indeks Keberdayaan Masyarakat (KbM) dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah Kec. Laweyan, Kec. Banjarsari, Kec. Jebres, Kec. Pasar Kliwon, dan Kec. Seregan.

d. Peringkat untuk Sub Indeks Keswadayaan Masyarakat (KsM) dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah Kec. Seregan, Kec. Jebres, Kec. Banjarsari, Kec. Pasar Kliwon, dan Kec. Laweyan.

3. IPKel (Indeks Pembangunan Kelurahan) di 51 Kelurahan di Kota Surakarta

Dari hasil perhitungan Indeks Pembangunan Kelurahan (IPKel) secara rata-rata selama tahun 2004-2006 yang diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, dan juga sub indeks pembentuk IPKel di 51 kelurahan di Kota Surakarta, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Untuk Indeks Pembangunan Kelurahan (IPKel) di 51 kelurahan yang ada di Kota Surakarta telah ditemukan bahwa peringkat 5 (lima) besar kelurahan dengan IPKel dari yang tertinggi, yaitu: (i) Kelurahan Jajar [Kec. Laweyan]; (ii) Kelurahan Kerten [Kec. Laweyan]; (iii) Kelurahan Sumber [Kec. Banjarsari]; (iv) Kelurahan Mojosongo [Kec. Jebres]; dan (v) Kelurahan Gandekan [Kec. Jebres]. Sedang 5 (lima) kelurahan dengan IPKel dari yang terkecil, yaitu: (i) Kelurahan Semanggi [Kec. Pasar Kliwon]; (ii) Kelurahan Pasar Kliwon [Kec. Pasar Kliwon]; (iii) Kelurahan Kepatihan Wetan [Kec. Jebres]; (iv) Kelurahan Panularan [Kec. Laweyan]; dan (v) Kelurahan Kepatihan Kulon [Kec. Jebres].

b. Untuk Sub Indeks Kapasitas Pemerintahan (KpP) di 51 kelurahan yang ada di Kota Surakarta telah ditemukan bahwa peringkat 5 (lima) besar kelurahan dengan sub indeks KpP dari yang tertinggi, yaitu: (i) Kelurahan Purwosari [Kec. Laweyan]; (ii) Kelurahan Sondakan [Kec. Laweyan]; (iii) Kelurahan Punggawan [Kec. Banjarsari]; (iv) Kelurahan Mangkubumen [Kec. Banjarsari]; dan (v) Kelurahan Laweyan [Kec. Laweyan]. Sedang 5 (lima) kelurahan dengan sub indeks KpP dari yang terkecil, yaitu: (i) Kelurahan Mojosongo [Kec. Jebres]; (ii) Kelurahan Karangasem [Kec. Laweyan]; (iii) Kelurahan Semanggi [Kec. Pasar Kliwon]; (iv) Kelurahan Tegalarjo [Kec. Jebres]; dan (v) Kelurahan Kepatihan Kulon [Kec. Jebres]

c. Untuk Sub Indeks Perkembangan Wilayah (PkW) di 51 kelurahan yang ada di Kota Surakarta telah ditemukan bahwa peringkat 5 (lima) besar kelurahan dengan sub indeks PkW dari yang tertinggi, yaitu: (i) Kelurahan Sriwedari [Kec. Laweyan]; (ii) Kelurahan Jebres [Kec. Jebres]; (iii) Kelurahan Tegalarjo [Kec. Jebres]; (iv) Kelurahan Mojosongo [Kec. Jebres]; dan (v) Kelurahan Pajang [Kec. Laweyan]. Sedang 5 (lima) kelurahan dengan sub indeks PkW dari yang terkecil, yaitu: (i) Kelurahan Semanggi [Kec. Pasar Kliwon]; (ii) Kelurahan Jagalan [Kec. Jebres]; (iii) Kelurahan Laweyan [Kec. Laweyan]; (iv) Kelurahan Kestalan [Kec. Banjarsari]; dan (v) Kelurahan Pucang Sawit [Kec. Kec. Jebres].

d. Untuk Sub Indeks Keberdayaan Masyarakat (KbM) di 51

kelurahan yang ada di Kota Surakarta, telah ditemukan bahwa peringkat 5 (lima) besar kelurahan dengan sub indeks KbM dari yang tertinggi, yaitu: (i) Kelurahan Jajar [Kec. Laweyan]; (ii) Kelurahan Kerten [Kec. Laweyan]; (iii) Kelurahan Sumber [Kec. Banjarsari]; (iv) a. Kelurahan Mojosongo [Kec. Jebres]; dan (v) Kelurahan Banyuanyar [Kec. Banjarsari]. Sedang 5 (lima) kelurahan dengan sub indeks KbM dari yang terkecil, yaitu: (i) Kelurahan Joyotakan [Kec. Serengan]; (ii) Kelurahan Pajang [Kec. Laweyan]; (iii) Kelurahan Penumping [Kec. Laweyan]; (iv) Kelurahan Nusukan [Kec. Banjarsari]; dan (iv) Kelurahan Purwodiningratan [Kec. Jebres].

- e. Untuk Sub Indeks Keswadayaan Masyarakat (KsM) di 51 kelurahan yang ada di Kota Surakarta, telah ditemukan bahwa peringkat 5 (lima) besar kelurahan dengan sub indeks KsM dari yang tertinggi, yaitu: (i) Kelurahan Danukusuman [Kec. Serengan]; (ii) Kelurahan Gandekan [Kec. Jebres]; (iii) Kelurahan Gilingan [Kec. Banjarsari]; (iv) Kelurahan Pucang Sawit [Kec. Jebres]; dan (v) Kelurahan Sudiroprajan [Kec. Jebres]. Sedang 5 (lima) kelurahan dengan sub indeks KbM dari yang terkecil, yaitu: b. (i) Kelurahan Karangasem [Kec. Laweyan]; (ii) Kelurahan Sriwedari [Kec. Laweyan]; (iii) Kelurahan Tipes [Kec. Serengan]; (iv) Kelurahan Panularan [Kec. Laweyan]; dan (v) Kelurahan Gajahan [Kec. Pasar Kliwon].

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari serangkaian analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, maka beberapa simpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Dari hasil pengkajian Indeks Pembangunan Kelurahan (IPKel) di tingkat Kota Surakarta, yang dihitung dari rerata masing-masing indeks dan sub indeks pembentuk IPKel, dapat dijelaskan bahwa IPKel Kota Surakarta secara rata-rata selama tahun 2004-2006 adalah sebesar 1,2313; dengan sub indeks pembentuk IPKel, adalah: (i) Besarnya Sub Indeks Kapasitas Pemerintahan (KpP) adalah sebesar 2,0718; (ii) Besarnya Sub Indeks Perkembangan Wilayah (PkW) adalah sebesar 1,0335; (iii) Besarnya Sub Indeks Keberdayaan Masyarakat (KbM) adalah sebesar 0,9785; dan (iv) Besarnya Sub Indeks Keswadayaan Masyarakat (KsM) adalah sebesar 0,8211. Hal ini membawa mempunyai makna bahwa penyumbang besar terhadap IPKel di Kota Surakarta masih didominasi oleh besarnya sub indeks KpP sementara sub indeks KsM masih relatif rendah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kelurahan masih relatif kecil.

Dari hasil perhitungan Indeks Pembangunan Kelurahan (IPKel) secara rata-rata di tingkat kecamatan dapat disimpulkan bahwa urutan IPKel dari yang terbesar hingga yang terkecil berturut-turut adalah: (i) Kec. Laweyan; (ii) Kec. Banjarsari; (iii) Kec. Jebres; (iv) Kec. Serengan; dan (v) Kec. Pasar Kliwon. Hal ini membawa implikasi bahwa pembangunan di Kota Surakarta masih maju di wilayah-wilayah bagian barat dan tengah, sementara di wilayah timur dan utara masih relatif rendah

atau belum maju. Sedang untuk sub indeks pembentuk IPKel di tingkat kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Peringkat untuk Sub Indeks Kapasitas Pemerintahan (KpP) dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah: (i) Kec. Laweyan; (ii) Kec. Banjarsari; (iii) Kec. Pasar Kliwon; (iv) Kec. Serengan, dan (v) Kec. Jebres. Hal ini membawa implikasi bahwa lokasi pemerintahan yang dekat dengan Pemerintahan Kota membawa dampak pada besaran sub indeks KpP yang lebih besar dibanding dengan lokasi kecamatan yang semakin jauh dari Pusat Pemerintahan Kota.
- 2) Peringkat untuk Sub Indeks Perkembangan Wilayah (PkW) dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah: (i) Kec. Jebres; (ii) Kec. Laweyan; (iii) Kec. Banjarsari; (iv) Kec. Serengan; dan (v) Kec. Pasar Kliwon. Hal ini membawa implikasi bahwa pemikiran untuk memajukan wilayah di bagian utara (Kec. Jebres) sudah mulai kelihatan sejak periode 2004-2006, dengan indikasi sub indeks PkW untuk Kecamatan Jebres sudah menduduki peringkat yang baik. Sementara untuk wilayah bagian timur (Kec. Pasar Kliwon), masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan di bidang perkembangan wilayah. Lokasi yang dekat dengan Bantaran Sungai Bengawan Solo (Sering Banjir pada awal-awal musim penghujan), sedikit banyak menghambat dalam kemajuan pembangunan di beberapa kelurahan di kecamatan ini.
- 3) Peringkat untuk Sub Indeks Keberdayaan Masyarakat (KbM) dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah: (i) Kec. Laweyan; (ii) Kec. Banjarsari; (iii) Kec. Jebres; (iv) Kec. Pasar Kliwon;

dan (v) Kec. Serengan. Hal ini membawa implikasi bahwa tingkat keberdayaan masyarakat di Kecamatan Laweyan relatif lebih baik dibanding dengan kecamatan yang lain. Keberadaan 'TRADEMARK KAMPUNG BATIK' di wilayah ini sedikit banyak telah mengangkat citra masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat di wilayah ini.

- 4) Peringkat untuk Sub Indeks Keswadayaan Masyarakat (KsM) dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah: (i) Kec. Serengan; (ii) Kec. Jebres; (iii) Kec. Banjarsari; (iv) Kec. Pasar Kliwon; dan (v) Kec. Laweyan. Hal ini membawa implikasi bahwa IPKel yang tinggi tidak otomatis dibentuk oleh sub-sub indeks yang tinggi pula. Kecamatan Serengan yang mempunyai IPKel rendah ternyata dalam sub indeks KsM-nya tinggi.

Dari hasil perhitungan Indeks Pembangunan Kelurahan (IPKel) secara rata-rata selama tahun 2004-2006 yang diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, dan juga sub indeks pembentuk IPKel di 51 kelurahan di Kota Surakarta, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Untuk Indeks Pembangunan Kelurahan (IPKel) di 51 kelurahan yang ada di Kota Surakarta telah ditemukan bahwa peringkat 5 (lima) besar kelurahan dengan IPKel dari yang tertinggi, yaitu: (i) Kelurahan Jajar [Kec. Laweyan]; (ii) Kelurahan Kerten [Kec. Laweyan]; (iii) Kelurahan Sumber [Kec. Banjarsari]; (iv) Kelurahan Mojosongo [Kec. Jebres]; dan (v) Kelurahan Gandekan [Kec. Jebres]. Sedang 5 (lima) kelurahan dengan IPKel dari yang terkecil, yaitu: (i) Kelurahan Semanggi [Kec. Pasar Kliwon]; (ii) Kelurahan Pasar Kliwon [Kec. Pasar Kliwon]; (iii)

- Kelurahan Kepatihan Wetan [Kec. Jebres]; (iv) Kelurahan Panularan [Kec. Laweyan]; dan (v) Kelurahan Kepatihan Kulon [Kec. Jebres].
- 2) Untuk Sub Indeks Kapasitas Pemerintahan (KpP) di 51 kelurahan yang ada di Kota Surakarta telah ditemukan bahwa peringkat 5 (lima) besar kelurahan dengan sub indeks KpP dari yang tertinggi, yaitu: (i) Kelurahan Purwosari [Kec. Laweyan]; (ii) Kelurahan Sondakan [Kec. Laweyan]; (iii) Kelurahan Punggawan [Kec. Banjarsari]; (iv) Kelurahan Mangkubumen [Kec. Banjarsari]; dan (v) Kelurahan Laweyan [Kec. Laweyan]. Sedang 5 (lima) kelurahan dengan sub indeks KpP dari yang terkecil, yaitu: (i) Kelurahan Mojosongo [Kec. Jebres]; (ii) Kelurahan Karangasem [Kec. Laweyan]; (iii) Kelurahan Semanggi [Kec. Pasar Kliwon]; (iv) Kelurahan Tegalarjo [Kec. Jebres]; dan (v) Kelurahan Kepatihan Kulon [Kec. Jebres].
  - 3) Untuk Sub Indeks Perkembangan Wilayah (PkW) di 51 kelurahan yang ada di Kota Surakarta telah ditemukan bahwa peringkat 5 (lima) besar kelurahan dengan sub indeks PkW dari yang tertinggi, yaitu: (i) Kelurahan Sriwedari [Kec. Laweyan]; (ii) Kelurahan Jebres [Kec. Jebres]; (iii) Kelurahan Tegalarjo [Kec. Jebres]; (iv) Kelurahan Mojosongo [Kec. Jebres]; dan (v) Kelurahan Pajang [Kec. Laweyan]. Sedang 5 (lima) kelurahan dengan sub indeks PkW dari yang terkecil, yaitu: (i) Kelurahan Semanggi [Kec. Pasar Kliwon]; (ii) Kelurahan Jagalan [Kec. Jebres]; (iii) Kelurahan Laweyan [Kec. Laweyan]; (iv) Kelurahan Kestalan [Kec. Banjarsari]; dan (v) Kelurahan Pucang Sawit [Kec. Kec. Jebres].
  - 4) Untuk Sub Indeks Keberdayaan Masyarakat (KbM) di 51 kelurahan yang ada di Kota Surakarta, telah ditemukan bahwa peringkat 5 (lima) besar kelurahan dengan sub indeks KbM dari yang tertinggi, yaitu: (i) Kelurahan Jajar [Kec. Laweyan]; (ii) Kelurahan Kerten [Kec. Laweyan]; (iii) Kelurahan Sumber [Kec. Banjarsari]; (iv) Kelurahan Mojosongo [Kec. Jebres]; dan (v) Kelurahan Banyuanyar [Kec. Banjarsari]. Sedang 5 (lima) kelurahan dengan sub indeks KbM dari yang terkecil, yaitu: (i) Kelurahan Joyotakan [Kec. Serengan]; (ii) Kelurahan Pajang [Kec. Laweyan]; (iii) Kelurahan Penumping [Kec. Laweyan]; (iv) Kelurahan Nusukan [Kec. Banjarsari]; dan (v) Kelurahan Purwodiningratan [Kec. Jebres].
  - 5) Untuk Sub Indeks Keswadayaan Masyarakat (KsM) di 51 kelurahan yang ada di Kota Surakarta, telah ditemukan bahwa peringkat 5 (lima) besar kelurahan dengan sub indeks KsM dari yang tertinggi, yaitu: (i) Kelurahan Danukusuman [Kec. Serengan]; (ii) Kelurahan Gandekan [Kec. Jebres]; (iii) Kelurahan Gilingan [Kec. Banjarsari]; (iv) Kelurahan Pucang Sawit [Kec. Jebres]; dan (v) Kelurahan Sudioprajan [Kec. Jebres]. Sedang 5 (lima) kelurahan dengan sub indeks KbM dari yang terkecil, yaitu: (i) Kelurahan Karangasem [Kec. Laweyan]; (ii) Kelurahan Sriwedari [Kec. Laweyan]; (iii) Kelurahan Tipes [Kec. Serengan]; (iv) Kelurahan Panularan [Kec. Laweyan]; dan (v) Kelurahan Gajahan [Kec. Pasar Kliwon].

## Saran dan Implementasi Kebijakan

Saran dan implementasi kebijakan yang dapat diambil dari serangkaian studi terkait dengan penyusunan Indeks Pembangunan Kelurahan (IPKel) di 51 kelurahan di Kota Surakarta selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun 2004, 2005 dan 2006 adalah sebagai berikut:

- a. Dengan telah disusunnya Indeks Pembangunan Kelurahan (IPKel) di Kota Surakarta tahun 2004, 2005, dan 2006; baik IPKel Total maupun Sub-Sub IPKel menurut sub-kriteria tertentu [Sub Indeks Kapasitas Pemerintahan (KpP), Sub Indeks Perkembangan Wilayah (PkW), Sub Indeks Keberdayaan Masyarakat (KbM) dan Sub Indeks Keswadayaan Masyarakat (KsM)]; hasilnya dapat dijadikan sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan di dalam mengelola pemerintahan di tingkat kelurahan di Kota Surakarta pada khususnya, dan dapat diadopsi di kelurahan-kelurahan lain di Indonesia. IKel yang tinggi mencerminkan bahwa pengelolaan pemerintahan di suatu kelurahan menunjukkan adanya kinerja (*performance*) yang lebih baik dibanding dengan kelurahan lain yang mempunyai besaran indeks di bawahnya.
- b. Dengan dihasilkannya IPKel di Kota Surakarta, dapat dijadikan sebagai pedoman/dasar di dalam mengalokasikan anggaran pembangunan yang tidak semata-mata berdasar atas asas pemerataan, namun juga memper-timbangkan prestasi kerja dari masing-masing kecamatan dan juga dari masing-masing kelurahan; termasuk di dalamnya untuk memberikan perhatian khusus kepada kelurahan-kelurahan yang masih mempunyai indeks dan sub indeks yang relatif rendah.
- c. Dengan melihat hasil perhitungan nilai IPKel dan juga sub indeks pembentuk IPKel; dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan program-program pembangunan yang lebih tinggi di tingkat kota dan kecamatan di Kota Surakarta telah berpengaruh dan mempengaruhi terhadap kinerja pembangunan di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, yang dalam hal ini adalah kinerja pembangunan di 51 kelurahan di Kota Surakarta. Hasil dari evaluasi atas kinerja pembangunan di tingkat kelurahan dapat dijadikan sebagai bahan untuk kegiatan perencanaan pembangunan di masa-masa mendatang, khususnya di dalam menyusun dokumen RENSTRA-SKPD (Rencana Strategis – Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kelurahan yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan juga RENJA-SKPD (Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kelurahan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan di Kota Surakarta.
- d. Dengan melihat berbagai indikator data yang digunakan di dalam penyusunan indeks dan sub indeks ini, maka setiap kelurahan dapat memperbaiki basis data yang selama ini telah dan sedang didokumentasikan dalam bentuk Monografi Kelurahan, selanjutnya mengevaluasi tingkat keakuratan datanya sekaligus mengembangkan data-data yang selama ini belum didokumentasikan dan diperlukan sebagai penunjang pembentukan indeks di masa-masa mendatang yang lebih baik dan lebih akurat.
- e. Suatu kelurahan dan juga kecamatan yang dalam dokumen Indeks Pembangunan Kelurahan (IPKel) ini, kebetulan mempunyai peringkat (*rating*) yang rendah, harus segera dievaluasi dan

kemudian dilanjutkan dengan terus mengupayakan peningkatan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di masing-masing wilayah kerjanya.

### 3. Keterbatasan Studi

Studi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat keakuratan data sekunder yang tersedia di masing-masing kelurahan yang digunakan sebagai masukan utama dalam studi ini. Studi ini belum dikatakan optimal karena adanya 2 (dua) anggapan yang menjadikan keterbatasan studi ini, yaitu: Pertama, karena data tahun 2007 tidak semua kelurahan lengkap (sebagian besar masih kosong), maka perhitungan dan analisis IPKel menggunakan data isian dari tahun 2004-2006. Hal ini membawa implikasi bahwa hasil analisis menjadi kurang mutakhir. Kedua, karena variabel Keuangan Daerah yang membentuk Sub Indeks Kapasitas Pemerintahan sebagian besar tidak terisi, maka digunakan pendekatan isian secara proporsional yang terus meningkat selama kurun waktu 2004-2006. Pada butir yang kedua lebih didasarkan pada suatu kenyataan bahwa kelurahan merupakan bentuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang tidak mempunyai kemandirian secara langsung dalam menyusun anggarannya sendiri sebagaimana pada Pemerintahan Desa. Hal inilah yang merupakan kelemahan kajian pada Tahun Pertama (2008), sehingga pengkajian di Pemerintahan Desa kemungkinan akan menghasilkan temuan yang menarik (Hibah Tahun Ke-2, Tahun 2009).

Di samping itu, ada kelemahan yang lain yaitu bahwa perhitungan indeks dan sub indeks masih didasarkan pada hasil perhitungan rerata selama kurun waktu 2004-2006 sehingga potret dari tahun ke tahun belum didokumentasikan sehingga

ada / tidaknya kenaikan indeks dan sub indeks belum dipaparkan. Kelemahan lain yaitu belum digunakannya seperangkat alat analisis statistik, semisal Simpangan Baku (*Standart Deviation*), Koefisien Variasi (*Coefficient of Variation*), dan juga alat analisis uji-F (*F-Test*) untuk melengkapi temuan hasil indeks dan sub indeks. Hal inilah yang pada hibah tahun ke-2 (Tahun 2009) diharapkan akan dilengkapi sehingga hasil akhirnya benar-benar bisa dijadikan percontohan atau prototif untuk perhitungan dan pengukuran kemajuan pembangunan desa dan kelurahan di daerah-daerah lain selain Kota Surakarta (prototif tipe kelurahan pada tahun pertama, 2008) dan di Kabupaten Karanganyar (prototif tipe desa pada tahun kedua, 2009).

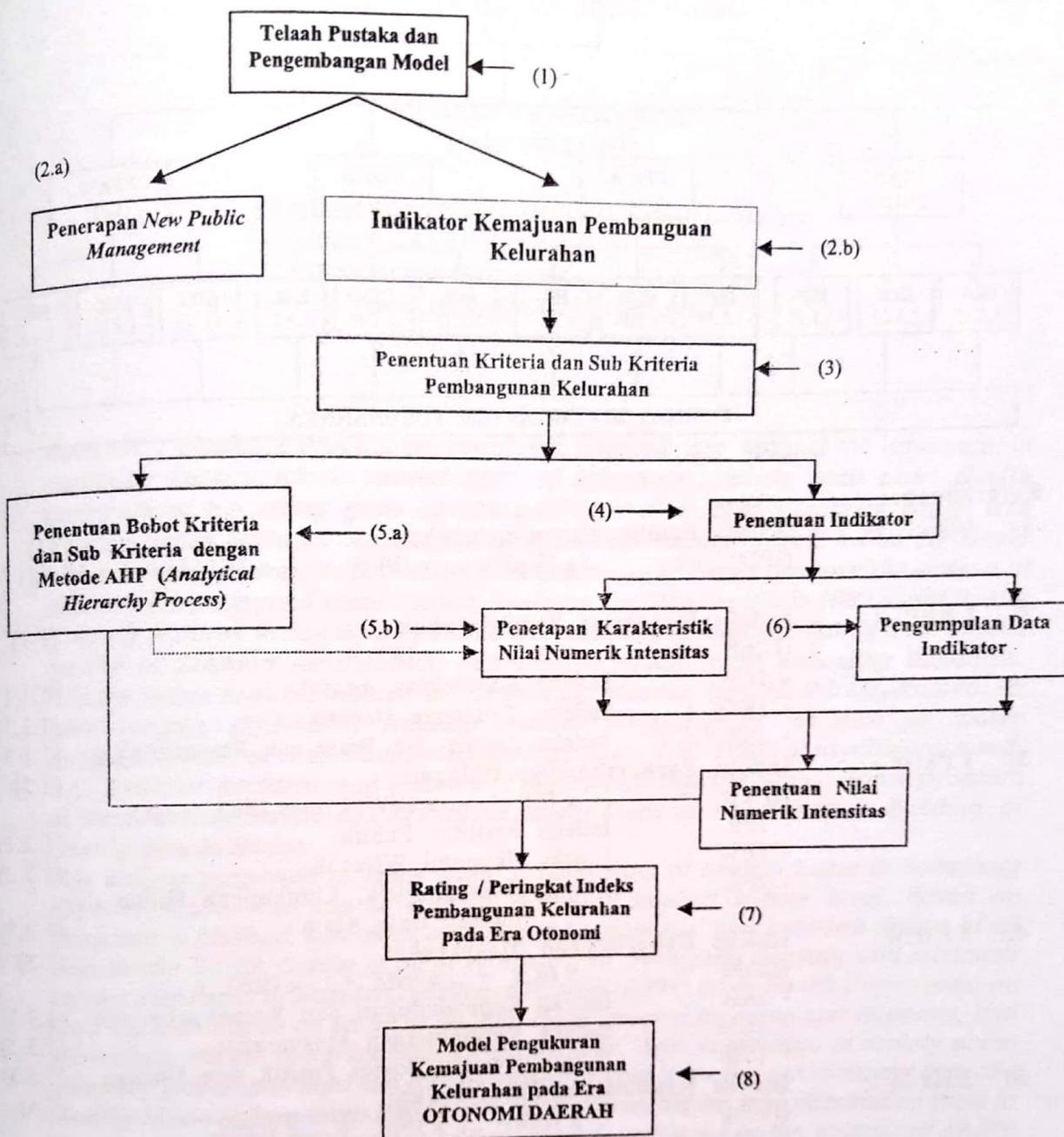
### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Departemen Pendidikan Nasional melalui Proyek Peningkatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor: 017/SP2H/PP/DP2M/III/2008, tanggal 6 Maret 2008. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah memungkinkan diselesakannya studi ini.

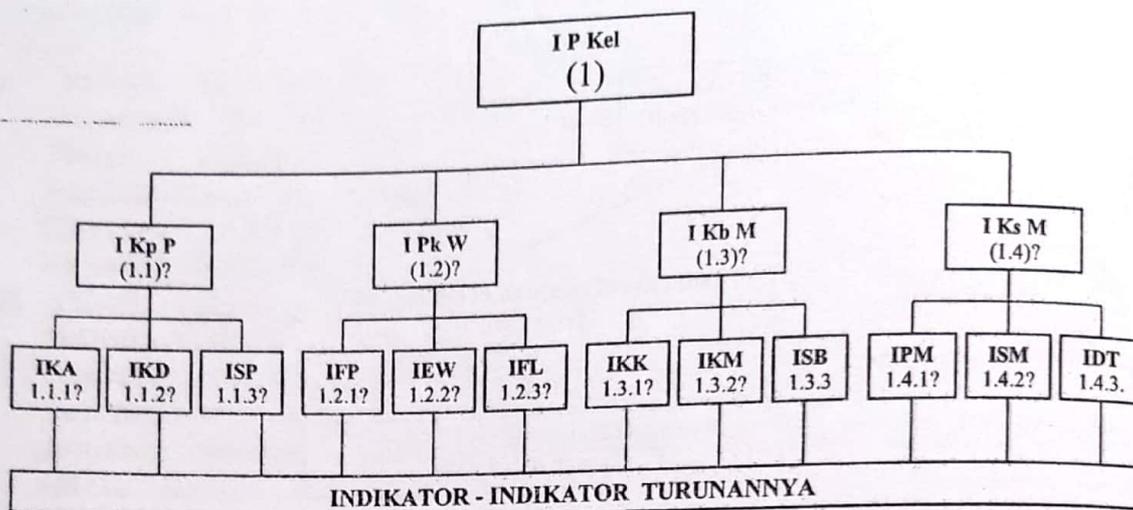
## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2001) "Indeks Pembangunan Daerah (*Regional Development Index*)". Draft/Rancangan dalam Bentuk Ringkasan yang Diterbitkan oleh Bappenas di Jakarta, pada 29 Oktober.
- Bapeda Kabupaten Klaten.. (2004). *Review Program Pembangunan (PROPEDA) Kabupaten Klaten Tahun 2001-2005*. Klaten: Bapeda Kabupaten Klaten.
- BPS dan Bappeda Propinsi Jawa Tengah. (beberapa terbitan). *Jawa Tengah Dalam Angka*. Jawa Tengah : BPS dan Bappeda.
- Barzelay, Michael. (2001). *The New Public Management: Improving Research and Policy Dialogue*. USA: The Regents of University of California.
- BPS, BAPPENAS dan UNDP. (2001). *INDONESIA HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2001: Towards a New Consensus, Democracy and Human Development in Indonesia*. Jakarta: BPS, BAPPENAS dan UNDP.
- Dirjen Otda Depdagri dan Bappenas. (2002). *Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Mendukung Desentralisasi*. Jakarta: Dirjen Otda Depdagri dan Bappenas.
- Dirjen PKPD Depkeu RI. (2004). *Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal*. Jakarta: Dirjen PKPD. (2004).
- \_\_\_\_\_ *Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2001-2003*. Jakarta: Dirjen PKPD.
- Dunn, William N. (2001). *Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8. Yogyakarta: PT Hanindita Graha Widya.
- Ewalt, Jo Ann G. (2001) "Theories of Governance and New Public Management: Links to Understanding Welfare Policy Implementation", Prepared for Presentation at the Annual Conference of the American Society for Public Administration.
- Fahmi Wibawa dan Moch.Yunus (Editor). (2004). *Inovasi sebagai Referensi (Tiga Tahun Otonomi Daerah dan Otonomi Award)*, Cetakan Pertama. Surabaya: Jawa Post Institute of Pro-Otonomi.
- Indra J.Piliang, Dendi Ramdani dan Agung Pribadi. (2003). *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, Cetakan I. Jakarta: Devisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa.
- KPPOD, USAID dan The Asean Fondation. (2004). *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, 2003*. Jakarta: KPPOD, USAID dan The Asean Fondation.
- Kahlil Rowter (1996). "Indikator-Indikator Sosial Ekonomi". Bahan-bahan yang disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan di LPEM FE UI. Jakarta.
- Kamaluddin, Rustian. (1998). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Larbi, George A. (1999). "The New Public Management Approach and Crisis States", *United Nations Research Institute for Social Development*, Discussion Paper No. 112, September, pp.1-50.
- Leigh, Andrew and Justin Wolfers. (2006). "Happiness and the Human Development Index: Australia is Not a Paradox", *The Australian Economic*

- Review, Vol.39, No.2, pp. 176-84.
- Lijan Poltak Sinambela. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- LPEM FE-UI. (2003). "Teknik dan Metode-Metode Analisis Daerah". Bahan-bahan untuk Pendidikan dan Latihan Jenjang Jabatan Fungsional (Mata Diklat: *Regional and Local Analysis*).
- Mayumdar, Krisna. (t.th). "An Alternative Approach for Estimating Human Development Index", *Indian Statistical Institute*, pp. 1-16.
- McGillivray and Farhad Noorbakhsh. (2004). "Composite Indices of Human Well-being: Past, Present and Future", *WIDER Research Paper*, No. 63, November, pp. 1-19.
- Morris David Marris. (1979). *Measuring the Condition of the World's Poor: The Physical Quality of Live Index*. USA: Pergaman Press.
- Mudrajad Kuncoro. (1997). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Noorbakhsh, Farhad. (2003). "Human Development and Disparities in India", *Centre for Development, Department of Economics, University of Glasgow*, May, pp. 1-33.
- Piter Abdullah; Armida S.Alisjahbana; Nurry Effendi; dan Boediono. (2002). *Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Ranis, Gustav; Frances Stewart and Emma Samman. (2006). "Human Development: Beyond the Human Development Index", *Journal of Human Development*, Vol.7, No.3, November, pp. 324-58.
- Republik Indonesia. (2005). *Kebijakan Menteri Dalam Negeri tentang Kelurahan dan Desa*. Jakarta: Penerbit CV Medya Duta.
- UNDP. (2006). *Human Development Report 2006 (Beyond Scarcity: Power, Poverty and the Global Water Crisis*. New York: Palgrave Macmillan Ltd.
- Wang, Xiaolu. (2007). "Who's in First? A Regional Development Index for the People's Republic of China's Provinces", *ADB Institute Discussion Paper*, No. 66, May, pp. 1-31.
- Zgurovsky, Michael. (2007). "Impact of the Information Society on Sustainable Development: Global and Regional Aspects", *Data Science Journal*, Vol. 6 (Supplement), March, pp.S137-S145.



**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Penyusunan Indeks Pembangunan Kelurahan (IPKel)**  
**di 51 Kelurahan di Kota Surakarta.**



**Keterangan:**

1. **IPKel :** **Indeks Pembangunan Kelurahan (1)**  
 $(IPD = \dots \times IKpP + \dots \times IPkW + \dots \times IKbM + \dots \times IKsM)$
  
2. **IKpP :** **Indeks Kapasitas Pemerintahan (1.1)**  
 $(IKpP = \dots \times IKA + \dots \times IKD + \dots \times ISP)$ 
  - IKA : Indeks Kapabilitas Aparat (1.1.1)
  - IKD : Indeks Keuangan Daerah (1.1.2)
  - ISP : Indeks Sarana dan Prasarana Pemerintahan (1.1.3)
  
3. **IPkW :** **Indeks Perkembangan Wilayah (1.2)**  
 $(IPkW = \dots \times IFP + \dots \times IEW + \dots \times IFL)$ 
  - IFP : Indeks Fasilitas Publik (1.2.1)
  - IEW : Indeks Ekonomi Wilayah (1.2.2)
  - IFL : Indeks Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (1.2.3)
  
4. **IKbM :** **Indeks Keberdayaan Masyarakat (1.3)**  
 $(IkbM = \dots \times IKK + \dots \times ISM + \dots \times ISB)$ 
  - IKK : Indeks Kependudukan dan Ketenagakerjaan (1.3.1)
  - IKM : Indeks Kesejahteraan Masyarakat (1.3.2)
  - ISB : Indeks Kondisi Sosial Politik dan Budaya (1.3.3)
  
5. **IKsM :** **Indeks Keswadayaan Masyarakat (1.4)**  
 $(IksM = \dots \times IPM + \dots \times ISM + \dots \times IDT)$ 
  - IPM : Indeks Partisipasi Masyarakat (1.4.1)
  - ISM : Indeks Swadaya Murni (1.4.2)
  - IDT : Indeks Daya Tarik (1.4.3)

**Catatan:** ..... (titik-titik) akan diisi dengan angka/besaran parameter hasil perhitungan AHP (*Analitical Hierarchy Process*) dari seperangkat angket yang diedarkan pada ahli, pejabat dan praktisi terkait.

**Gambar 2.2.**  
**Rancangan Kerangka Pembobotan Masing-masing Indeks dan Sub-Indeks Pengukuran Indikator Kemajuan Pembangunan Kelurahan pada Era Otonomi**